



Anteseden Efektivitas Pengelolaan BUMDes di Indonesia

Dahlia Tri Angraini*^{a)}, Tubagus Ismail^{b)}, Elvin Bastian^{c)}, Nurhayati Soleha^{d)}

^{a)} Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Tangerang Selatan, Banten

Program Doktor Ilmu Akuntansi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jl. Raya Palka KM 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten

^{b,c,d)} Program Doktor Ilmu Akuntansi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jl. Raya Palka KM 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten

Email: d.triangraini@umj.ac.id^{a)}; 7783230032@untirta.ac.id^{a)}

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received 21-01-2025

Revised 06-02-2025

Accepted 10-02-2025

Kata Kunci:

BUMDes; Inovasi-Kreativitas; Akuntabilitas Keuangan; Sertifikasi Halal

Keywords:

BUMDes; Innovation-Creativity; Financial Accountability; Halal Certification

A B S T R A K

Isu pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) jarang diteliti dibandingkan UMKM. BUMDes berperan memberdayakan dan membangun ekonomi desa namun hanya sedikit yang berkontribusi untuk pembangunan desa. Belum optimalnya kinerja BUMDes ditunjukkan dengan rendahnya pendapatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menguji, serta menganalisis determinan pengelolaan efektif BUMDes. Urgensitasnya mendorong terciptanya efektivitas pengelolaan BUMDes dan memberikan pertimbangan kepada pemerintah dalam pengembangannya. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh signifikan inovasi kreativitas terhadap pemilihan sertifikat halal dan terhadap efektivitas pengelolaan BUMDes, pengaruh tidak signifikan akuntabilitas keuangan terhadap pemilihan sertifikat halal serta inovasi kreativitas dan akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan BUMDes. Dalam mediasi, pemilihan sertifikat halal tidak memediasi pengaruh inovasi kreativitas dan akuntabilitas keuangan terhadap efektivitas pengelolaan BUMDes. Secara teoritis, hasil penelitian ini berimplikasi pada teori institusi bahwa kinerja BUMDes sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial yaitu kemampuan inovasi kreativitas dan kepemilikan sertifikat halal, sedangkan akuntabilitas keuangan belum berdampak signifikan. Secara praktik, hendaknya negara membuat kebijakan dan sosialisasi tentang pengelolaan BUMDes yang baik untuk mendukung kemandirian desa.

A B S T R A C T

The issue of managing Village-Owned Enterprises (BUMDes) is rarely studied compared to MSMEs. BUMDes plays a role in empowering and building the village economy, but only a few contribute to village development. The suboptimal performance of BUMDes is indicated by low income. This study aims to determine, test, and analyze the determinants of effective BUMDes management. Its urgency encourages the creation of effective BUMDes management and provides considerations to the government in its development. The results of the study indicate that there is a significant influence of creative innovation on the ownership of halal certificates and on the effectiveness of BUMDes management, an insignificant influence of financial accountability on the ownership of halal certificates and creative innovation and accountability on the effectiveness of BUMDes management. In mediation, the ownership of halal certificates does not mediate the influence of creative innovation and financial accountability on the effectiveness of BUMDes management. Theoretically, the results of this study have implications for institutional theory that BUMDes performance is greatly influenced by the social environment, namely the ability to innovate creativity and ownership of halal certificates, while financial accountability

has not had a significant impact. In practice, the state should make policies and socialize about good BUMDes management to support village independence.

@2025 Dahlia Tri Anggraini, Tubagus Ismail, Elvin Bastian, Nurhayati Soleha
Under The License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu lembaga ekonomi yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah desa yang bertujuan untuk pemberdayaan dan pembangunan ekonomi desa. Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa (Laoly, 2015). Hal ini menyiratkan bahwa BUMDes tidak hanya didirikan untuk lingkup satu desa saja namun bisa juga didirikan antar-Desa (BUMDes bersama).

Hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Posi & Putra, 2021). Untuk mewujudkan hal ini diperlukan dukungan dari pemerintah pusat kepada pemerintah dan masyarakat desa. Pemerintah bertindak sebagai pembuat peraturan yang dapat mendorong strategi investasi dari dalam maupun luar negeri. Dukungan lainnya dengan melakukan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan tentang manajemen BUMDes, dan pengalokasian dana desa secara tepat sasaran kepada BUMDes.

Saat ini terdapat 340 BUMDes di Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Lebak, dari ratusan BUMDes itu, tercatat hanya tiga puluh saja yang berkontribusi untuk pembangunan desa masing-masing. Belum optimalnya BUMDes berkinerja sehingga pendapatan dan pemasukan cenderung menurun dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan, para pengelola tidak melakukan pengembangan dan inovasi usaha mereka yang menyebabkan BUMDes dalam posisi stagnan (Nurandi, 2022). Sebenarnya sudah ada upaya pemerintah provinsi Banten dalam meningkatkan performa BUMDes. Diantaranya dengan melakukan pembinaan seperti kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten kepada BUMDes yang berada di bawah Provinsi Banten (Kabupaten Lebak, Serang, Tangerang, Pagedangan, dan lain-lain). Kegiatan ini menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Pemerintah Provinsi Banten berharap bahwa setelah kegiatan pembinaan ini, pengelola BUMDes mendapatkan ide untuk mengembangkan sector pariwisata di desa masing-masing dengan memanfaatkan kearifan lokal. Dengan tumbuhnya kreativitas dan inovasi tersebut, BUMDes bisa berkembang dan turut serta menyokong perekonomian desa (Suryana, 2022). Hasil penelitian terkini yang dilakukan oleh (Nursetiawan, 2018) yang menyatakan bahwa strategi yang dapat dilakukan untuk membangun desa mandiri yaitu dengan melakukan inovasi di setiap sendi lembaga usaha BUMDes. Inovasi dalam bidang komunikasi dan teknologi informasi, kapabilitas manajerial, serta infrastruktur BUMDes.

Kabupaten Lebak, Provinsi Banten memiliki pengelola BUMDes yang cukup kreatif. Sejak tahun 2019, BUMDes Cimenteng Jaya Kecamatan Cibadak Kabupaten

Lebak metintis usaha dengan mengelola wisata permainan air seluas 1,500 m² permodalan berasal dari dana desa (DD) setempat sebesar Rp 300 juta. Dana ini digunakan untuk membangun sarana dan prasarana wisata air waterboom juga balai-balai untuk pengunjung dan kios untuk menampung pedagang. Wisata ini membuka lapangan kerja baru bagi penduduk setempat. Juga dapat mengembangkan para UMKM setempat untuk membuat kerajinan tangan (tas, dompet, sandal, dan pakaian) dan juga kuliner (ranginang, opak, dan kerupuk) khas daerah. Maka pengelolaan BUMDes yang baik, akan dapat melahirkan kluster-kluster ekonomi masyarakat dan mampu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran (Suryana, 2022).

Selain inovasi dan kreativitas yang harus dimiliki oleh pengelola BUMDes, pemilikan sertifikat halal produk juga akan mampu menjadi faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan BUMDes. Untuk dapat menembus pasar global, para UMKM di bawah BUMDes harus memiliki sertifikat halal. Menurut BPS, besaran pengeluaran dana untuk makanan dan gaya hidup masyarakat Muslim di dunia mencapai USD 2.1 Triliun pada tahun 2017. Dan diperkirakan akan terus tumbuh mencapai USD 3 Miliar pada tahun 2023 ini. Maka pemerintah mencanangkan 1 juta sertifikat halal untuk produk kuliner maupun kriya UMKM Indonesia untuk dapat diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI sampai tahun 2024. Selain bertujuan global, sertifikat halal memiliki tujuan dasar yaitu untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk juga meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal (UU RI No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, 2014). Hasil penelitian (Fajar et al., 2022) menyatakan bahwa sertifikasi halal diharapkan dapat meningkatkan pendapatan UMKM pada BUMDes Jamu di Kabupaten Sampang dan Bangkalan.

Pengelola BUMDes selain harus memiliki kreativitas dan sertifikat halal, akuntabilitas keuangan juga berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan BUMDes. Akuntabilitas merupakan wujud dari tata kelola (good governance) dalam suatu organisasi termasuk organisasi pelayanan masyarakat. BUMDes merupakan sektor publik, keefektifitasannya di era keterbukaan informasi sekarang ini sangat dituntut oleh masyarakat dalam bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban (Fariyansyah et al., 2018). Hal ini direalisasikan dalam bentuk dokumen dan laporan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, hingga pertanggungjawaban guna menjaga kepercayaan masyarakat dan menjaga eksistensi badan usaha sehingga dalam diukur keberhasilan akurasi akuntabilitas organisasi pelayanan Masyarakat (Ana & Ga, 2021). Akuntabilitas terdiri dari 5 dimensi, yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial (Mahmudi, 2013). Hasil penelitian (Nursetiawan, 2018) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban merupakan faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan BUMDes. Penelitian ini berfokus pada akuntabilitas finansial yang harus dilaksanakan oleh BUMDes demi mendukung efektivitas pengelolaan BUMDes.

Penelitian ini menggunakan teori institusional yakni sebuah kenyataan bahwa struktur suatu organisasi dipengaruhi oleh lingkungan sosial tempat ia berada (Carruthers, 1995). Awalnya, teori institusional ini sebenarnya merupakan teori kajian bidang sosiologi (Amirya et al., 2012) akan tetapi selanjutnya berkembang ke dalam

disiplin ilmu ekonomi, politik, hukum dan studi organisasi (Sunarto, 2004) yang akhirnya pada tahun 2004 Dillard, Rigsby and Goodman memberikan pernyataan sebagai berikut "*Institutional theory is becoming one of the dominant theoretical perspectives in organization theory and is increasingly being applied in accounting research to study the practice of accounting in organizations*" (Deegan & Unerman, 2006).

Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh inovasi-kreatifitas, akuntabilitas, dan sertifikasi halal secara parsial serta sertifikasi halal sebagai pemediasi bagi inovasi-kreatifitas dan akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan BUMDes. Penelitian ini memiliki urgensi untuk mendorong terciptanya pengelolaan BUMDes yang efektif agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada seluruh desa di Indonesia. Keunikan penelitian ini adalah belum ada penelitian terdahulu yang menggabungkan ketiga variabel ini menjadi sebuah penelitian juga mayoritas penelitian terdahulu menggunakan desain kualitatif untuk meneliti efektivitas pengelolaan BUMDes.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Institusional

Institusional yakni sebuah kenyataan bahwa struktur suatu organisasi dipengaruhi oleh lingkungan sosial tempat ia berada (Deegan & Unerman, 2006). Pada tahun 2004 Dillard, Rigsby and Goodman memberikan pernyataan sebagai berikut "*Institutional theory is becoming one of the dominant theoretical perspectives in organization theory and is increasingly being applied in accounting research to study the practice of accounting in organizations*" (Deegan & Unerman, 2006). Terjadinya transformasi penerapan standar akuntansi berbasis akrual di lembaga pemerintah daerah termasuk BUMDes merupakan salah satu upaya untuk memperoleh legitimasi dari pemerintah pusat. Mereka berupaya melembagakan unsur-unsur lingkungan (ide, logika, praktik, teknik, dan kebiasaan) ke dalam organisasi sehingga menjadi bagian dari lembaga organisasi tersebut (Djambhuri, 2009).

Pengelolaan Efektif BUMDes

Definisi BUMDes berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa Pasal 1 ayat 6 yang membahas tentang BUMDes menjelaskan bahwa BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Menurut (Dian, 2017), BUMDes memiliki empat tujuan utama, yakni: meningkatkan perekonomian masyarakat desa, meningkatkan pendapatan masyarakat desa, mengoptimalkan potensi sumber daya alam untuk kebutuhan masyarakat, dan menjadi alat pemerataan serta pertumbuhan ekonomi desa.

Inovasi Dan Kreativitas

Inovasi merupakan kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dengan keadaan sebelumnya, serta tentunya sesuai dengan ide, fakta, dan informasi yang telah ada. Produk inovasi pada umumnya menunjukkan sifat-sifat yang baru, berkualitas, dan menguntungkan (Nursetiawan, 2018). Hal-hal yang mendasari inovasi

antara lain; 1) relative advantage, 2) compatibility, 3) complexity, 4) trialability, dan 5) observability (Rogers, 1983).

Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas sering digunakan pada konsep atau pemahaman yang luas untuk merepresentasikan transparansi, kepercayaan, dan efektivitas bagi mereka yang diberikan kepercayaan untuk menjalankan tanggung jawabnya (Mujazie, 2021). BUMDes merupakan salah satu bentuk implementasi pengelolaan keuangan desa dengan mengelola potensi kemandirian desa. Usaha ini memenuhi kriteria dari SAK EMKM sebagai UMKM (Herianti et al., 2023).

Sertifikat Halal

Sertifikat halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Ketentuan terkait wajibnya kepemilikan sertifikat halal terdapat pada Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Tujuan perregulasian jaminan produk halal antara lain: memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal (UU RI No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, 2014).

Pengembangan Hipotesis

Inovasi-Kreativitas Berpengaruh Terhadap Sertifikat Halal

Inovasi merupakan kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dengan keadaan sebelumnya, serta tentunya sesuai dengan ide, fakta, dan informasi yang telah ada (Nursetiawan, 2018). Sertifikat halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Sertifikat halal merupakan salah satu bentuk inovasi-kreativitas BUMDes untuk mendukung pengelolaan yang lebih terpercaya. Dalam teori institusional, struktur suatu organisasi dipengaruhi oleh lingkungan sosial tempat ia berada (Carruthers, 1995). Maka hipotesis penelitian ini adalah:

H1: Inovasi-kreativitas berpengaruh terhadap sertifikat halal

Akuntansi Keuangan Berpengaruh Terhadap Sertifikat Halal

Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban pertanggungjawaban seorang pemimpin atau pelaksana suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan terkait kinerja (Mujazie, 2021). Sertifikat halal terdapat pada Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Tujuan perregulasian jaminan produk halal antara lain: memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat. Merujuk pada teori institusional, bahwa struktur suatu organisasi dipengaruhi oleh lingkungan sosial tempat ia berada (Carruthers, 1995). Sertifikat halal juga merupakan salah satu bentuk transparansi di bidang proses produksi dan pemasaran baik jasa maupun dagang. Maka hipotesis penelitian ini adalah:

H2: Akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap sertifikat halal

Sertifikat Halal Berpengaruh Terhadap Efektivitas Pengelolaan BUMDes

Sertifikat halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI (RI, 2014). Merujuk pada teori institusional yakni sebuah kenyataan bahwa struktur suatu organisasi dipengaruhi oleh lingkungan sosial tempat ia berada (Carruthers, 1995). Pada organisasi publik (termasuk BUMDes), masyarakatlah yang menjadi stakeholdernya. UMKM maupun BUMDes yang telah memiliki sertifikat halal bisa dianggap sebagai bentuk keseriusan dalam mengelola usahanya. Karena sertifikat halal dapat menunjang proses pemasaran produk UMKM/ BUMDes (Fajar et al., 2022). Maka hipotesis penelitian ini adalah:

H3: Sertifikat halal berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan BUMDes

Inovasi-Kreativitas Berpengaruh Terhadap Efektivitas Pengelolaan BUMDes

Inovasi merupakan kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dengan keadaan sebelumnya, serta tentunya sesuai dengan ide, fakta, dan informasi yang telah ada. Inovasi-kreativitas dapat dilakukan dalam produk sesuai kearifan lokal, sistem informasi, pelayanan, pemasaran, dan seluruh proses produksi. Salah satu faktor penghambat dari strategi manajemen asset yang dilakukan oleh BUMDes yaitu terbatasnya inovasi dalam mengembangkan produk local (Hayyuna et al., 2020). Pada teori institusional yakni sebuah kenyataan bahwa struktur suatu organisasi dipengaruhi oleh lingkungan sosial tempat ia berada (Carruthers, 1995). Maka hipotesis penelitian ini adalah:

H4: Inovasi-Kreativitas berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan BUMDes

Akuntabilitas Keuangan Berpengaruh Terhadap Efektivitas Pengelolaan BUMDes

Akuntabilitas sering digunakan pada konsep atau pemahaman yang luas untuk merepresentasikan transparansi, kepercayaan, dan efektivitas bagi mereka yang diberikan kepercayaan untuk menjalankan tanggung jawabnya akan tetapi pada kenyataannya konsep akuntabilitas masih sulit untuk dapat cukup disimpulkan (Mujazie, 2021). Adanya kewajiban pihak pemerintah untuk dapat memberikan laporan dan menyajikan informasi secara transparan dan merinci kepada masyarakat yang memberikan mereka kewenangan dalam mengelola lembaga publik (Fariyansyah et al., 2018). Maka hipotesis penelitian ini adalah:

H5: Akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan BUMDes

Sertifikat Halal Memediasi Pengaruh Inovasi-Kreativitas Terhadap Efektivitas Pengelolaan BUMDes

Sertifikat halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI (UU RI No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, 2014). Dengan adanya sertifikat halal ini diharapkan akan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan BUMDes. Merujuk pada teori institusional yakni sebuah kenyataan bahwa struktur suatu organisasi dipengaruhi oleh lingkungan sosial tempat ia berada (Carruthers, 1995). Bahwa perusahaan publik harus mempertanggung-jawabkan dana milik masyarakat yang ia kelola. Masyarakat berhak menilai dan mengevaluasi jalannya perusahaan publik untuk perbaikan manajemen di masa depan. Maka hipotesis penelitian ini adalah:

H6: Sertifikat halal signifikan memediasi pengaruh inovasi-kreativitas terhadap efektivitas pengelolaan BUMDes

Sertifikat Halal Memediasi Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Terhadap Efektivitas Pengelolaan BUMDes

Sertifikat halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI (UU RI No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, 2014). Dengan adanya sertifikat halal ini merupakan bentuk akuntabilitas publik maka diharapkan akan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan BUMDes. Merujuk pada teori institusional yakni sebuah kenyataan bahwa struktur suatu organisasi dipengaruhi oleh lingkungan sosial tempat ia berada (Carruthers, 1995). Perusahaan publik harus mempertanggungjawabkan sumber daya milik masyarakat yang ia kelola. Masyarakat berhak menilai dan mengevaluasi jalannya perusahaan publik untuk perbaikan manajemen di masa depan.

H7: Sertifikat halal signifikan memediasi pengaruh akuntabilitas keuangan terhadap efektivitas pengelolaan BUMDes

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini adalah kuantitatif dengan data primer menggunakan metode survei. Sumber data pada penelitian ini yaitu wanita pelaku UMKM yang terhimpun dalam BUMDes Pagedangan. Teknik sampel menggunakan nonprobability sampling dengan jenis convenience sampling didapatkan sebanyak 50 orang sebagai responden. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung dan melalui *google form*. Metode analisis data dengan *software Smart PLS 4* dengan tahapan pengujian outer model meliputi *convergent validity*, *discriminant validity*, *average variance extracted*, dan *composite reliability*. Kemudian tahap pengukuran model structural (*inner model*) digunakan untuk melihat nilai *R square* sebagai uji *goodness fit model*. Tahap terakhir dilakukan pengujian untuk menilai koefisien parameter dan nilai signifikansi *t statistic* pada *Algorithm Bootstrapping report-Path coefficients*.

Peneliti tertarik mengambil sampel pelaku UMKM dalam BUMDes Pagedangan dimotivasi oleh peranan UMKM dalam BUMDes yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat desa, meningkatkan pendapatan masyarakat desa, mengoptimalkan potensi sumber daya alam untuk kebutuhan masyarakat, dan menjadi alat pemerataan serta pertumbuhan ekonomi desa. BUMDes Pagedangan memiliki keunikan yaitu mayoritas berskala mikro, lokasi masih dekat dengan pusat kota, dan tidak memiliki kearifan lokal tertentu. Keunikan ini menyebabkan BUMDes Pagedangan harus berjuang keras untuk dapat bersaing dengan pedagang besar di sekitarnya. Penelitian ini menggunakan satu variabel endogen yaitu Efektivitas Pengelolaan BUMDes, dua variabel eksogen yaitu inovasi-kreativitas dan akuntabilitas keuangan, serta satu variabel mediasi yaitu sertifikat halal. Skala likert 4-1 (Sangat Setuju–Sangat Tidak Setuju) digunakan dalam pengukuran setiap variabel atas pernyataan kuesioner. Adapun operasionalisasi variabel penelitian sebagai berikut:

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Kode
Inovasi dan Kreativitas (X1) (Rogers, 1983)	1. Relative Advantage	Produk BUMDes memiliki keunggulan kompetitif	X1.1
	2. Compatibility	Produk BUMDes menggunakan teknologi dalam sistem informasinya	X1.2
	3. Complexity	Produk BUMDes memiliki variasi yang cukup banyak	X1.3
	4. Trialability	Produk BUMDes sudah diuji coba sebelum dipasarkan	X1.4
	5. Observability	Produk BUMDes merupakan hasil pengamatan yang dimodifikasi	X1.5
Akuntabilitas (X2) (Mujazie, 2021)	1. Transparansi	BUMDes melakukan pencatatan keuangan secara rutin dan terbuka	X2.1
	2. Kepercayaan	Pencatatan keuangan akan menunjang kepercayaan/validitas bisnis	X2.2
	3. Efektivitas	Pencatatan dilakukan secara manual maupun sistem (yang lebih mudah)	X2.3
		Akuntabilitas dibutuhkan BUMDes untuk pertanggungjawaban keuangan kepada pemerintah	X2.4
Sertifikat Halal (M) (UU No. 33 Th 2014)	1. Halal Bahan Produk	Sertifikat halal mencakup halal bahan produk	M.1
	2. Halal Peralatan	Sertifikat halal mencakup halal peralatan dalam usaha	M.2
	3. Halal Proses	Sertifikat halal mencakup halal proses dalam usaha	M.3
		Sertifikat halal mendukung kemajuan usaha BUMDes	M.4
Efektivitas Pengelolaan BUMDes (Y) (Sempro, 2020)	1. Pencapaian Tujuan	BUMDes harus dikelola dengan efektif untuk mencapai tujuan	Y.1
	2. Integrasi	BUMDes berintegrasi atas program/kebijakan pemerintah	Y.2
	3. Adaptasi	BUMDes beradaptasi sesuai perkembangan zaman	Y.3
	4. Pengaturan	Pengelolaan BUMDes dilakukan dengan sistematis	Y.4

Sumber: Data diolah, 2024

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

Analisis Measurement (Outer Model)

Analisis *Measurement* atau evaluasi *outer model* dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas model pada penelitian.

Evaluasi Model Pengukuran

Outer Loading, Composite Reliability, dan Average Variance Extracted

Model pengukuran dalam penelitian ini terdiri dari model pengukuran reflektif di mana variabel inovasi-kreativitas, akuntabilitas keuangan, sertifikat halal, dan efektivitas pengelolaan BUMDes diukur secara reflektif. Tabel 4 menunjukkan hasil *Outer Loading, Composite Reliability, dan Average Variance Extracted*:

Tabel 4. *Outer Loading, Composite Reliability, dan Average Variance Extracted*

Variabel	Indikator	Pernyataan	Outer Loading	Cronbach's Alpha	Composite Reliability (rho_c)	AVE
Inovasi-Kreativitas	X1.2	Produk BUMDes menggunakan teknologi dalam sistem informasinya	0.655	0.463	0.732	0.479
	X1.3	Produk BUMDes memiliki variasi yang cukup banyak	0.624			
	X1.4	Produk BUMDes sudah diuji coba sebelum dipasarkan	0.786			
Akuntabilitas Keuangan	X2.3	Pencatatan dilakukan secara manual maupun sistem (yang lebih mudah)	0.729	0.412	0.77	0.627
	X2.4	Akuntabilitas dibutuhkan BUMDes untuk pertanggungjawaban keuangan kepada pemerintah	0.851			
Sertifikat Halal	M.1	Sertifikat halal mencakup halal bahan produk	0.601	0.703	0.816	0.528
	M.2	Sertifikat halal mencakup halal peralatan dalam usaha	0.751			
	M.3	Sertifikat halal mencakup halal proses dalam usaha	0.803			
	M.4	Sertifikat halal mendukung kemajuan usaha BUMDes	0.736			
Efektivitas BUMDes	Y.1	BUMDes harus dikelola dengan efektif untuk mencapai tujuan	0.712	0.635	0.766	0.526
	Y.2	BUMDes berintegrasi atas program/kebijakan pemerintah	0.613			
	Y.3	BUMDes beradaptasi sesuai perkembangan zaman	0.834			

Sumber: Data diolah SmartPLS 4, 2024

Variabel inovasi dan kreativitas diukur oleh tiga item pengukuran valid dengan outer loading antara 0,624 - 0,768 yang berarti bahwa ketiga item pengukuran tersebut valid. Tingkat reliabilitas variabel dapat diterima yang ditunjukkan oleh nilai AVE 0,479 mendekati 0,5.

Variabel akuntabilitas keuangan diukur oleh dua item pengukuran valid dengan outer loading antara 0,729 dan 0,851 yang berarti bahwa kedua item pengukuran tersebut valid. Tingkat reliabilitas variabel dapat diterima yang ditunjukkan oleh nilai AVE 0,627 > 0,5.

Variabel sertifikat halal diukur oleh empat item pengukuran valid dengan outer loading antara 0,613 - 0,803. Tingkat reliabilitas variabel dapat diterima yang ditunjukkan oleh nilai AVE 0,528 > 0,5.

Variabel efektivitas pengelolaan diukur oleh tiga item pengukuran valid dengan outer loading antara 0,601 - 0,834 yang berarti bahwa ketiga item pengukuran tersebut valid. Tingkat reliabilitas variabel dapat diterima yang ditunjukkan oleh nilai AVE 0,526 > 0,5.

Discriminant Validity

Pada tabel 5 di bawah ini menunjukkan bahwa nilai *cross loading* dari setiap indikator masing-masing variabel lebih besar dari nilai *cross loading* variabel lainnya, maka disimpulkan bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur variabelnya masing-masing lebih baik daripada variabel lainnya.

Tabel 5. Discriminant Validity (Fornell-Larcker)

	Akuntabilitas Keuangan	Efektivitas BUMDes	Inovasi Kreativitas	Sertifikat Halal
Akuntabilitas Keuangan	0.792			
Efektivitas BUMDes	0.162	0.725		
Inovasi Kreativitas	0.106	-0.007	0.629	
Sertifikat Halal	0.353	0.429	0.398	0.727

Sumber: Data diolah SmartPLS, 2024

Evaluasi Model Struktural

Uji Multikolinieritas (Inner VIF < 5)

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis model structural maka perlu melihat ada tidaknya multikolinier antara variabel yaitu dengan ukuran statistic inner VIF. Pada tabel 6 menunjukkan hasil estimasi nilai VIF < 5 maka tingkat multikolinier antara variabel rendah. Hasil ini menguatkan hasil estimasi parameter dalam SEM PLS bersifat robust (tidak bias).

Tabel 6. Uji Multikolinieritas

	VIF
AK--EB	1.144
AK—SH	1.011
IK—EB	1.19
IK—SH	1.011
SH—EB	1.343

Sumber: Data diolah SmartPLS, 2024

Uji Signifikansi Path Coefficient (P Value < 0,05 Sig)

Uji signifikansi (pengaruh langsung) dapat dilihat pada tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7. Uji Signifikansi Path Coefficient (Pengaruh Langsung)

Hipotesis	Path Coefficient	P Value	95% Interval Kepercayaan Path Coefficient		f Square
			Batas Bawah	Batas Atas	
H1. Inovasi Kreativitas--Sertifikat Halal	0.364	0.032	0.004	0.682	0.176
H2. Akuntabilitas Keuangan-	0.314	0.143	-0.225	0.635	0.131

-Sertifikat Halal					
H3. Sertifikat Halal--Efektivitas BUMDes	0.499	0.003	0.036	0.748	0.236
H4. Inovasi Kreativitas--Efektivitas BUMDes	-0.206	0.461	-0.670	0.361	0.045
H5. Akuntabilitas Keuangan--Efektivitas BUMDes	0.008	0.970	-0.381	0.382	0.000

Sumber: Data diolah SmartPLS 4, 2024

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas maka diketahui sebagai berikut:

Hipotesis pertama (H1) diterima yaitu terdapat pengaruh signifikan inovasi kreativitas terhadap sertifikat halal dengan path coefficient (0,364) dan 0070-value (0,032 < 0,05).

Hipotesis kedua (H2) ditolak yaitu terdapat pengaruh tidak signifikan akuntabilitas keuangan terhadap sertifikat halal dengan path coefficient (0,314) dan p-value (0,143 > 0,05).

Hipotesis ketiga (H3) diterima yaitu terdapat pengaruh signifikan sertifikat halal terhadap efektivitas pengelolaan BUMDes dengan path coefficient (0,499) dan p-value (0,003 < 0,05).

Hipotesis keempat (H4) ditolak yaitu terdapat pengaruh tidak signifikan inovasi kreativitas terhadap efektivitas pengelolaan BUMDes dengan path coefficient (-0,206) dan p-value (0,461 > 0,05).

Hipotesis kelima (H5) ditolak yaitu terdapat pengaruh tidak signifikan akuntabilitas keuangan terhadap efektivitas pengelolaan BUMDes dengan path coefficient (0,008) dan p-value (0,970 > 0,05).0020

Uji signifikansi (pengaruh tidak langsung)

Dapat dilihat pada tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 8. Uji Signifikansi Path Coefficient (Pengaruh Mediasi)

Hipotesis	Path Coefficient	P Value	95% Interval Kepercayaan Path Coefficient	
			Batas Bawah	Batas Atas
H6. Inovasi Kreativitas--Sertifikat Halal--Efektivitas BUMDes	0.182	0.118	-0.046	0.438
H7. Akuntabilitas Keuangan--Sertifikat Halal--Efektivitas BUMDes	0.157	0.201	-0.122	0.378

Sumber: Data diolah SmartPLS 4, 2024

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas maka diketahui sebagai berikut:

Hipotesis keenam (H6) ditolak yaitu sertifikat halal tidak dapat memediasi pengaruh inovasi kreativitas terhadap efektivitas pengelolaan BUMDes dengan path coefficient (0,182) dan p-value (0,118 > 0,05).

Hipotesis ketujuh (H7) ditolak yaitu sertifikat halal tidak dapat memediasi pengaruh akuntabilitas keuangan terhadap efektivitas pengelolaan BUMDes dengan path coefficient (0,157) dan p-value (0,201 > 0,05).

Pembahasan

1. Pengaruh inovasi kreativitas terhadap sertifikat halal

Inovasi kreativitas berpengaruh terhadap sertifikat halal dengan path coefficient (0,364) dan p-value ($0,032 < 0,05$). Setiap perubahan inovasi kreativitas akan meningkatkan pemilikan sertifikat halal. Indonesia merupakan negara Muslim terbesar di Asia sehingga memiliki sertifikat halal merupakan suatu kewajiban. Maka BUMDes berinovasi bukan hanya pada produk namun juga pada kepemilikan sertifikat halal guna memiliki keunggulan kompetitif. Maka setiap perubahan inovasi kreativitas akan meningkatkan pemilikan sertifikat halal. Hal ini mendukung teori institusional yakni sebuah kenyataan bahwa struktur suatu organisasi dipengaruhi oleh lingkungan sosial tempat ia berada (Carruthers, 1995). Sejalan dengan penelitian bahwa pengelolaan BUMDes yang baik (inovatif dan kreatif) akan dapat melahirkan kluster-kluster ekonomi masyarakat dan mampu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran.

2. Pengaruh akuntabilitas keuangan terhadap sertifikat halal

Akuntabilitas keuangan berpengaruh tidak signifikan terhadap sertifikat halal dengan path coefficient (0,314) dan p-value ($0,143 > 0,05$). Akuntabilitas keuangan tidak dapat meningkatkan kepemilikan sertifikat halal pada BUMDes. Hasil ini bertentangan dengan teori institusional yakni sebuah kenyataan bahwa struktur suatu organisasi dipengaruhi oleh lingkungan sosial tempat ia berada (Carruthers, 1995) dan bertentangan dengan penelitian Mujazie (2018). BUMDes menganggap bahwa kepemilikan sertifikat halal bukan merupakan bentuk akuntabilitas keuangan.

3. Pengaruh sertifikat halal terhadap efektivitas pengelolaan BUMDes

Sertifikat halal berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan BUMDes dengan path coefficient (0,499) dan p-value ($0,003 < 0,05$). Setiap perubahan sertifikat halal akan meningkatkan efektivitas pengelolaan BUMDes. Merujuk pada teori institusional yakni sebuah kenyataan bahwa struktur suatu organisasi dipengaruhi oleh lingkungan sosial tempat ia berada (Carruthers, 1995). UMKM maupun BUMDes yang telah memiliki sertifikat halal bisa dianggap sebagai bentuk keseriusan UMKM/BUMDes dalam mengelola usahanya. Karena sertifikat halal dapat menunjang proses pemasaran produk UMKM/ BUMDes (Fajar et al., 2022).

4. Pengaruh inovasi dan kreativitas terhadap efektivitas pengelolaan BUMDes

Inovasi kreativitas berpengaruh tidak signifikan terhadap efektivitas pengelolaan BUMDes dengan path coefficient (-0,206) dan p-value ($0,461 > 0,05$). Merujuk pada teori institusional seharusnya sebuah kenyataan bahwa struktur suatu organisasi dipengaruhi oleh lingkungan sosial tempat ia berada (Carruthers, 1995) namun inovasi kreativitas para pengelola belum mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan BUMDes saat ini. Sebab salah satu faktor penghambat dari strategi manajemen asset yang dilakukan oleh BUMDes yaitu terbatasnya inovasi dalam mengembangkan produk local (Hayyuna et al., 2020).

5. Pengaruh akuntabilitas keuangan terhadap efektivitas pengelolaan BUMDes

Akuntabilitas keuangan berpengaruh tidak signifikan terhadap efektivitas pengelolaan BUMDes dengan path coefficient (0,008) dan p-value ($0,970 > 0,05$).

Merujuk pada teori institusional seharusnya sebuah kenyataan bahwa struktur suatu organisasi dipengaruhi oleh lingkungan sosial tempat ia berada (Carruthers, 1995). Saat ini, akuntabilitas keuangan BUMDes tidak mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan BUMDes. Akuntabilitas publik pada lembaga pemerintahan daerah belum 100% dijalankan mungkin keterbatasan sumber daya manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan kemampuan (Fariyansyah et al., 2018).

6. Peran Sertifikat halal dalam memediasi pengaruh inovasi kreativitas terhadap efektivitas pengelolaan BUMDes

Sertifikat halal tidak dapat memediasi pengaruh inovasi kreativitas terhadap efektivitas pengelolaan BUMDes dengan path coefficient (0,182) dan p-value (0,118 > 0,05). Merujuk pada teori institusional seharusnya sebuah kenyataan bahwa struktur suatu organisasi dipengaruhi oleh lingkungan sosial tempat ia berada (Carruthers, 1995). Sertifikat halal tidak mampu memediasi/menjelaskan inovasi kreativitas para pengelola BUMDes sehingga belum mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan BUMDes saat ini. Kepemilikan sertifikat halal hanya sebagai penggugur kewajiban dari pemerintah pusat tanpa merasakan manfaat sesungguhnya bagi peningkatan kinerja BUMDes.

7. Peran Sertifikat halal dalam memediasi pengaruh akuntabilitas keuangan terhadap efektivitas pengelolaan BUMDes

sertifikat halal tidak dapat memediasi pengaruh akuntabilitas keuangan terhadap efektivitas pengelolaan BUMDes dengan path coefficient (0,157) dan p-value (0,201 > 0,05). Merujuk pada teori institusional seharusnya sebuah kenyataan bahwa struktur suatu organisasi dipengaruhi oleh lingkungan sosial tempat ia berada (Carruthers, 1995). Sertifikat halal tidak mampu memediasi/menjelaskan akuntabilitas keuangan BUMDes sehingga belum mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan BUMDes saat ini. Kepemilikan sertifikat halal sebagai bentuk akuntabilitas hanya sebagai penggugur kewajiban dari pemerintah pusat tanpa merasakan manfaat sesungguhnya bagi peningkatan kinerja BUMDes. Saat ini akuntabilitas publik pada lembaga pemerintahan daerah termasuk sertifikat halal pada BUMDes belum 100% dijalankan mungkin keterbatasan sumber daya manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan kemampuan (Fariyansyah et al., 2018).

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut bahwa inovasi kreativitas berpengaruh signifikan terhadap sertifikat halal, sedangkan akuntabilitas keuangan berpengaruh tidak signifikan. Sertifikat halal berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan BUMDes sedangkan inovasi kreativitas dan akuntabilitas keuangan berpengaruh tidak signifikan. Dalam hal mediasi, sertifikat halal tidak dapat memediasi pengaruh inovasi kreativitas dan akuntabilitas keuangan terhadap efektivitas pengelolaan BUMDes.

Keterbatasan

Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan yaitu BUMDes yang diteliti hanya 1 (satu) yaitu BUMDes Pagedangan dengan 50 (lima puluh) UMKM yang

berada di bawah pengelolaannya. Sehingga belum dapat menggenalisir BUMDes secara nasional. Serta adanya beberapa pernyataan penelitian yang belum memenuhi tingkat validitas dan reliabilitas.

Saran

Penelitian selanjutnya harap memperluas BUMDes yang diteliti agar dapat menggenalisir BUMDes secara nasional. Serta memperkuat peran akuntabilitas keuangan dan peran sertifikat halal agar dapat meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirya, M., Djamhuri, A., & Ludigdo, U. (2012). Nomor 3 Halaman 334-501 Malang. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*, 3.
- Ana, A. T. R., & Ga, L. L. (2021). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan BUMDes (Studi Kasus BUMDes Ina Huk). In *Maret* (Vol. 2021, Issue 1).
- Carruthers, B. G. (1995). Accounting, ambiguity, and the new institutionalism. *Accounting, Organizations and Society*, 20(4), 313–328. [https://doi.org/10.1016/0361-3682\(95\)96795-6](https://doi.org/10.1016/0361-3682(95)96795-6)
- Deegan, C., & Unerman, J. (2006). *Financial Accounting Theory European Edition*. Mc Graw Hill.
- Dian, A. (2017). *Badan Usaha Milik Desa Ciri-Ciri, Tujuan, Landasan Hukum, Jenis Usaha*. <https://Dosenekonomi.Com/Ilmu-Ekonomi/Bumn/Badan-Usaha-Milik-Desa>.
- Djamhuri, A. (2009). a Case Study of Governmental Accounting. In *Universiti Sains Malaysia*.
- Fajar, Achmad Badarus Syamsi, & Adiyono. (2022). Sinergi BUMDes dan UMKM Jamu Guna Meningkatkan Pendapatan Melalui Pengelolaan Sertifikasi Halal di Kabupaten Sampang dan Bangkalan. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 4(1), 15–34. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i1.5457>
- Fariyansyah, A., Irianto, G., Dinas, R., Modal, P., Terpadu, P., Pintu, S., & Malang, K. (2018). Akuntabilitas Vertikal-Horizontal Aparatur Publik Dalam Perspektif Interpretive Phenomenology Heidegger. In *Jurnal Akuntansi Aktual* (Vol. 5, Issue 2).
- Hayyuna, R., Nur Pratiwi, R., & Indah Mindarti, L. (2021). Strategi Manajemen Aset BUMDes Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa (Studi pada BUMDes di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik). In *JAP* (Vol. 2, Issue 1).
- Herianti, E., Anggraini, D. T., Wahyudi, S., & ... (2023). Inovasi Kreatif Desa Mandiri Melalui Bumdesa Sebagai Penggerak Ekonomi Desa: Pendekatan Sistem Informasi (Bumdesa *Prosiding Seminar* ..., 4. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat/article/view/19492%0Ahttps://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat/article/download/19492/9506>
- Laoly, Y. H. (2015). Permendesa Nomor 4 Tahun 2015. In *Peraturan Kementerian Desa* (pp. 1–11). Kementerian Desa.
- Mahmudi. (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. STIE YKPN.
- Mujazie, S. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Studi Fenomena Pada Bumdes Tanjung Raya Desa Boyan Tanjung, Kec.

- BoyanTanjung, Kab. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. *Proceeding Seminar Bisnis Seri V*, 443–451.
- Nurandi. (2022). *Ratusan BUMDes di Lebak Banten Belum Bisa Berkontribusi Untuk Pembangunan Desa*. <https://banten.tribunnews.com/>
- Nursetiawan, I. (2018). *Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi Bumdes*.
- Posi, S. Hi., & Putra, S. P. A. M. (2021). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi, Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Terhadap Pelaporan Keuangan BUMDes Berdasarkan SAK ETAP. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*20, 12(02), 463–469.
- Rogers. (1983). *Diffusion of Innovations* (Third Edi). The Free Press.
- Sunarto, K. (2004). *Pengantar Sosiologi*. Lembaga Penerbit Universitas Indonesia.
- Suryana, M. (2022). *BUMDes di Kabupaten Lebak Berdayakan Ekonomi Lokal atasi Kemiskinan*. <https://Banten.Antaraneews.Com/>.
- UU RI No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (2014).